



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara;
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional;
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten;

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pemalang
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pemalang
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pemalang
Z4	= rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Pemalang
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Pemalang

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

- c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

↑

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2018

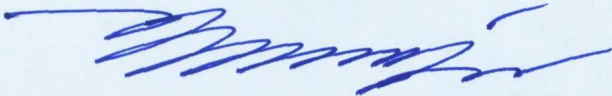
PARAF HIERARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 89 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN
ANGGARAN 2019

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULASI	PAGU DANA DESA
I.	AMPELGADING	1. BANGLARANGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 506,081,000	Rp. 1,178,502,000
		2. TEGALSARI TIMUR	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 826,321,000	Rp. 1,498,742,000
		3. KEMUNING	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 313,256,000	Rp. 985,677,000
		4. BLIMBING	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 310,599,000	Rp. 983,020,000
		5. KEBAGUSAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 696,378,000	Rp. 1,368,799,000
		6. CIBIYUK	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 536,562,000	Rp. 1,208,983,000
		7. SIDOKARE	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 469,451,000	Rp. 1,141,872,000
		8. UJUNGGEDE	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 637,750,000	Rp. 1,310,171,000
		9. KARANGTENGAH	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 433,608,000	Rp. 1,106,029,000
		10. KARANGTALOK	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 675,735,000	Rp. 1,348,156,000
		11. SOKAWATI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 643,867,000	Rp. 1,316,288,000
		12. WONOGIRI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 435,398,000	Rp. 1,107,819,000
		13. TEGALSARI BARAT	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 767,763,000	Rp. 1,440,184,000
		14. JATIREJO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 567,261,000	Rp. 1,239,682,000
		15. LOSARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 508,418,000	Rp. 1,180,839,000
		16. AMPELGADING	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 406,718,000	Rp. 1,079,139,000
II.	BANTARBOLANG	Jumlah	Rp. 10,758,736,000	Rp. 0	Rp. 8,735,166,000	Rp. 19,493,902,000
		1. SURU	Rp. 672,421,000	Rp. 211,288,875	Rp. 999,892,000	Rp. 1,883,601,875
		2. KEBON GEDE	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 661,386,000	Rp. 1,333,807,000
		3. PEGIRINGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,189,970,000	Rp. 1,862,391,000
		4. PABUARAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 646,779,000	Rp. 1,319,200,000
		5. SUMURKIDANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 778,541,000	Rp. 1,450,962,000
		6. SARWODADI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 510,042,000	Rp. 1,182,463,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULASI	PAGU DANA DESA
		7. WANARATA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,430,371,000	Rp. 2,102,792,000
		8. PURANA	Rp. 672,421,000	Rp. 211,288,875	Rp. 659,423,000	Rp. 1,543,132,875
		9. PAGUYANGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 644,616,000	Rp. 1,317,037,000
		10. BANJARSARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 354,392,000	Rp. 1,026,813,000
		11. BANTARBOLANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,056,997,000	Rp. 1,729,418,000
		12. SAMBENG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 580,436,000	Rp. 1,252,857,000
		13. KUTA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 721,474,000	Rp. 1,393,895,000
		14. PEDAGUNG	Rp. 672,421,000	Rp. 211,288,875	Rp. 1,118,857,000	Rp. 2,002,566,875
		15. LENGGERONG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 326,887,000	Rp. 999,308,000
		16. GLANDANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 573,383,000	Rp. 1,245,804,000
		17. KARANGANYAR	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 842,932,000	Rp. 1,515,353,000
		Jumlah	Rp. 11,431,157,000	Rp. 633,866,625	Rp. 13,096,378,000	Rp. 25,161,401,625
III.	BELIK	1. GOMBONG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,692,566,000	Rp. 2,364,987,000
		2. BULAKAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,569,774,000	Rp. 2,242,195,000
		3. GUNUNGJAYA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,635,629,000	Rp. 2,308,050,000
		4. SIKASUR	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,550,113,000	Rp. 2,222,534,000
		5. MENDELEM	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 2,156,666,000	Rp. 2,829,087,000
		6. BADAK	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,734,050,000	Rp. 2,406,471,000
		7. BELIK	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,490,024,000	Rp. 2,162,445,000
		8. KUTA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,907,184,000	Rp. 2,579,605,000
		9. KALISALEH	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 466,855,000	Rp. 1,139,276,000
		10. BELUK	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,686,602,000	Rp. 2,359,023,000
		11. GUNUNGTIGA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 602,120,000	Rp. 1,274,541,000
		12. SIMPUR	Rp. 672,421,000	Rp. 211,288,875	Rp. 1,196,566,000	Rp. 2,080,275,875
IV.	BODEH	Jumlah	Rp. 8,069,052,000	Rp. 211,288,875	Rp. 17,688,149,000	Rp. 25,968,489,875
		1. BODEH	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 307,467,000	Rp. 979,888,000
		2. PARUNG GALIH	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 728,848,000	Rp. 1,401,269,000
		3. JATINGARANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,181,523,000	Rp. 1,853,944,000
		4. JATROYOM	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,082,616,000	Rp. 1,755,037,000
		5. GUNUNGBATU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 567,718,000	Rp. 1,240,139,000
		6. KEBANDARAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 347,149,000	Rp. 1,019,570,000
		7. MUNCANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 492,273,000	Rp. 1,164,694,000

1

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULASI	PAGU DANA DESA
		8. KWASEN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 477,429,000	Rp. 1,149,850,000
		9. KESESIREJO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,138,812,000	Rp. 1,811,233,000
		10. KARANGBRAI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 634,454,000	Rp. 1,306,875,000
		11. PENDOWO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 472,328,000	Rp. 1,144,749,000
		12. PASIR	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 747,872,000	Rp. 1,420,293,000
		13. KELANGDEPOK	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 459,731,000	Rp. 1,132,152,000
		14. PAYUNG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 549,952,000	Rp. 1,222,373,000
		15. BABAKAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 426,649,000	Rp. 1,099,070,000
		16. JRAGANAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 371,502,000	Rp. 1,043,923,000
		17. LONGKEYANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 707,267,000	Rp. 1,379,688,000
		18. CANGAK	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 690,775,000	Rp. 1,363,196,000
		19. KEBANDUNGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 445,544,000	Rp. 1,117,965,000
		Jumlah	Rp. 12,775,999,000	Rp. 0	Rp. 11,829,909,000	Rp. 24,605,908,000
V.	COMAL	1. GANDU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 418,013,000	Rp. 1,090,434,000
		2. SIDOREJO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 654,374,000	Rp. 1,326,795,000
		3. GEDEG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 294,676,000	Rp. 967,097,000
		4. KEBOJONGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 546,958,000	Rp. 1,219,379,000
		5. WONOKROMO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 567,897,000	Rp. 1,240,318,000
		6. AMBOKULON	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 315,787,000	Rp. 988,208,000
		7. PURWOSARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 722,812,000	Rp. 1,395,233,000
		8. KANDANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 440,199,000	Rp. 1,112,620,000
		9. SUSUKAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 427,383,000	Rp. 1,099,804,000
		10. SARWODADI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 491,899,000	Rp. 1,164,320,000
		11. LOWA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 275,291,000	Rp. 947,712,000
		12. TUMBAL	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 537,876,000	Rp. 1,210,297,000
		13. PECANGAKAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,053,686,000	Rp. 1,726,107,000
		14. KLEGEN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 451,918,000	Rp. 1,124,339,000
		15. SIKAYU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 408,836,000	Rp. 1,081,257,000
		16. GINTUNG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 313,735,000	Rp. 986,156,000
		17. KAUMAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 756,650,000	Rp. 1,429,071,000
		Jumlah	Rp. 11,431,157,000	Rp. 0	Rp. 8,677,990,000	Rp. 20,109,147,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULASI	PAGU DANA DESA
VI.	MOGA	1. WALANGSANGA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 878,618,000	Rp. 1,551,039,000
		2. PEPEDAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 435,697,000	Rp. 1,108,118,000
		3. GENDOANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 937,386,000	Rp. 1,609,807,000
		4. PLAKARAN	Rp. 672,421,000	Rp. 211,288,875	Rp. 848,064,000	Rp. 1,731,773,875
		5. WANGKELANG	Rp. 672,421,000	Rp. 211,288,875	Rp. 543,366,000	Rp. 1,427,075,875
		6. SIMA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,463,661,000	Rp. 2,136,082,000
		7. MOGA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 834,773,000	Rp. 1,507,194,000
		8. KEBANGGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 375,151,000	Rp. 1,047,572,000
		9. MANDIRAJA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 679,037,000	Rp. 1,351,458,000
		10. BANYUMUDAL	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,223,800,000	Rp. 1,896,221,000
Jumlah			Rp. 6,724,210,000	Rp. 422,577,750	Rp. 8,219,553,000	Rp. 15,366,340,750
VII.	PEMALANG	1. SUNGAPAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 396,163,000	Rp. 1,068,584,000
		2. BANJARMULYA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 903,889,000	Rp. 1,576,310,000
		3. SURAJAYA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 942,976,000	Rp. 1,615,397,000
		4. SARADAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 382,916,000	Rp. 1,055,337,000
		5. DANASARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 531,013,000	Rp. 1,203,434,000
		6. SEWAKA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 530,487,000	Rp. 1,202,908,000
		7. WANAMULYA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 599,291,000	Rp. 1,271,712,000
		8. BOJONGNANGKA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,633,489,000	Rp. 2,305,910,000
		9. KRAMAT	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 425,888,000	Rp. 1,098,309,000
		10. PEGONGSORAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 612,624,000	Rp. 1,285,045,000
		11. LAWANGREJO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 500,565,000	Rp. 1,172,986,000
		12. MENGORI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 414,920,000	Rp. 1,087,341,000
		13. TAMBAKREJO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 899,336,000	Rp. 1,571,757,000
Jumlah			Rp. 8,741,473,000	Rp. 0	Rp. 8,773,557,000	Rp. 17,515,030,000
VIII.	PETARUKAN	1. SERANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,054,400,000	Rp. 1,726,821,000
		2. ISER	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 562,696,000	Rp. 1,235,117,000
		3. PEGUNDAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,278,455,000	Rp. 1,950,876,000
		4. KARANGASEM	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 367,032,000	Rp. 1,039,453,000
		5. PANJUNAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 481,855,000	Rp. 1,154,276,000
		6. SIRANGKANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 483,165,000	Rp. 1,155,586,000
		7. TEGALMLATI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 888,521,000	Rp. 1,560,942,000

1

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULASI	PAGU DANA DESA
		8. LONING	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 955,292,000	Rp. 1,627,713,000
		9. PETANJUNGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 683,824,000	Rp. 1,356,245,000
		10. KLAREYAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,310,475,000	Rp. 1,982,896,000
		11. KALIRANDU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 906,286,000	Rp. 1,578,707,000
		12. KENDALSARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,032,735,000	Rp. 1,705,156,000
		13. BULU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 375,013,000	Rp. 1,047,434,000
		14. WIDODAREN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 845,949,000	Rp. 1,518,370,000
		15. TEMUIRENG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 615,378,000	Rp. 1,287,799,000
		16. PESUCEN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 813,456,000	Rp. 1,485,877,000
		17. NYAMPLUNGSAARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,088,419,000	Rp. 1,760,840,000
		18. KENDALDOYONG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 948,431,000	Rp. 1,620,852,000
		19. KENDALREJO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 901,526,000	Rp. 1,573,947,000
		Jumlah	Rp. 12,775,999,000	Rp. 0	Rp. 15,592,908,000	Rp. 28,368,907,000
IX.	PULOSARI	1. CLEKATAKAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 871,219,000	Rp. 1,543,640,000
		2. NYALEMBENG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 550,666,000	Rp. 1,223,087,000
		3. GUNUNGSARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 839,113,000	Rp. 1,511,534,000
		4. GAMBUDHAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,166,858,000	Rp. 1,839,279,000
		5. PENAKIR	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 914,775,000	Rp. 1,587,196,000
		6. BATURSARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 675,386,000	Rp. 1,347,807,000
		7. JURANGMANGU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 440,867,000	Rp. 1,113,288,000
		8. CIKENDUNG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,018,121,000	Rp. 1,690,542,000
		9. KARANGSARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 548,754,000	Rp. 1,221,175,000
		10. SIREMENG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 737,608,000	Rp. 1,410,029,000
		11. PAGENTERAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 422,488,000	Rp. 1,094,909,000
		12. PULOSARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,003,936,000	Rp. 1,676,357,000
X.	RANDUDONGKAL	Jumlah	Rp. 8,069,052,000	Rp. 0	Rp. 9,189,791,000	Rp. 17,258,843,000
		1. SEMINGKIR	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 651,876,000	Rp. 1,324,297,000
		2. BANJARANYAR	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 511,519,000	Rp. 1,183,940,000
		3. KEJENE	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,331,337,000	Rp. 2,003,758,000
		4. KALITORONG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 560,014,000	Rp. 1,232,435,000
		5. REMBUL	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 359,855,000	Rp. 1,032,276,000
		6. KREYO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 868,731,000	Rp. 1,541,152,000

1

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULASI	PAGU DANA DESA
		7. MANGLI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 645,408,000	Rp. 1,317,829,000
		8. GONGSENG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 544,126,000	Rp. 1,216,547,000
		9. RANDUDONGKAL	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,293,176,000	Rp. 1,965,597,000
		10. MEJAGONG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 404,558,000	Rp. 1,076,979,000
		11. LODAYA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 319,388,000	Rp. 991,809,000
		12. KALIMAS	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 671,590,000	Rp. 1,344,011,000
		13. KARANGMONCOL	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,077,182,000	Rp. 1,749,603,000
		14. TANAHBAYA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 749,914,000	Rp. 1,422,335,000
		15. SEMAYA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 500,198,000	Rp. 1,172,619,000
		16. KECEPIT	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 382,938,000	Rp. 1,055,359,000
		17. GEMBYANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 484,080,000	Rp. 1,156,501,000
		18. PENUSUPAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 386,508,000	Rp. 1,058,929,000
		Jumlah	Rp. 12,103,578,000	Rp. 0	Rp. 11,742,398,000	Rp. 23,845,976,000
XI.	TAMAN	1. BANJARDAWA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 271,753,000	Rp. 944,174,000
		2. CIBELOK	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 609,185,000	Rp. 1,281,606,000
		3. SITEMU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 543,036,000	Rp. 1,215,457,000
		4. JEBED SELATAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 609,244,000	Rp. 1,281,665,000
		5. KEJAMBON	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 524,197,000	Rp. 1,196,618,000
		6. PENER	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 833,618,000	Rp. 1,506,039,000
		7. PENGGARIT	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 876,960,000	Rp. 1,549,381,000
		8. KEDUNGBANJAR	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 936,834,000	Rp. 1,609,255,000
		9. TAMAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,091,932,000	Rp. 1,764,353,000
		10. GONDANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 693,947,000	Rp. 1,366,368,000
		11. JRAKAH	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 858,188,000	Rp. 1,530,609,000
		12. PEDURUNGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,115,468,000	Rp. 1,787,889,000
		13. KALIGELANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 543,360,000	Rp. 1,215,781,000
		14. BANJARAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 567,970,000	Rp. 1,240,391,000
		15. WANAREJAN UTARA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 939,538,000	Rp. 1,611,959,000
		16. SOKAWANGI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 603,103,000	Rp. 1,275,524,000
		17. KABUNAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,029,389,000	Rp. 1,701,810,000
		18. JEBED UTARA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 565,818,000	Rp. 1,238,239,000
		19. ASEMDOYONG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,716,354,000	Rp. 2,388,775,000
		Jumlah	Rp. 12,775,999,000	Rp. 0	Rp. 14,929,894,000	Rp. 27,705,893,000

7

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULASI	PAGU DANA DESA
XII.	ULUJAMI	1. MOJO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 811,716,000	Rp. 1,484,137,000
		2. BOTEKAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 473,982,000	Rp. 1,146,403,000
		3. TASIKREJO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 735,757,000	Rp. 1,408,178,000
		4. KALIPRAU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 713,101,000	Rp. 1,385,522,000
		5. PAGERGUNUNG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 759,051,000	Rp. 1,431,472,000
		6. ROWOSARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 440,221,000	Rp. 1,112,642,000
		7. LIMBANGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 900,708,000	Rp. 1,573,129,000
		8. PADEK	Rp. 672,421,000	Rp. 211,288,875	Rp. 643,687,000	Rp. 1,527,396,875
		9. KETAPANG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 667,593,000	Rp. 1,340,014,000
		10. AMBOWETAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 336,793,000	Rp. 1,009,214,000
		11. BUMIREJO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 381,127,000	Rp. 1,053,548,000
		12. BLENDUNG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 778,679,000	Rp. 1,451,100,000
		13. PAMUTIH	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 697,044,000	Rp. 1,369,465,000
		14. SAMONG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 718,750,000	Rp. 1,391,171,000
		15. PESANTREN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,261,930,000	Rp. 1,934,351,000
		16. WIYOROWETAN	Rp. 672,421,000	Rp. 211,288,875	Rp. 526,542,000	Rp. 1,410,251,875
		17. KERTOSARI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 387,625,000	Rp. 1,060,046,000
		18. SUKOREJO	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 678,260,000	Rp. 1,350,681,000
Jumlah			Rp. 12,103,578,000	Rp. 422,577,750	Rp. 11,912,566,000	Rp. 24,438,721,750
XIII.	WARUNGPRING	1. WARUNGPRING	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,466,578,000	Rp. 2,138,999,000
		2. PAKEMBARAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 538,184,000	Rp. 1,210,605,000
		3. MERENG	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 804,099,000	Rp. 1,476,520,000
		4. KARANGDAWA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 509,741,000	Rp. 1,182,162,000
		5. CIBUYUR	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 943,665,000	Rp. 1,616,086,000
		6. DATAR	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 471,988,000	Rp. 1,144,409,000
Jumlah			Rp. 4,034,526,000	Rp. 0	Rp. 4,734,255,000	Rp. 8,768,781,000
XIV.	WATUKUMPUL	1. CIKADU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,064,305,000	Rp. 1,736,726,000
		2. TLAGASANA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,700,887,000	Rp. 2,373,308,000
		3. BONGAS	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,038,241,000	Rp. 1,710,662,000
		4. MAJAKERTA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 930,870,000	Rp. 1,603,291,000
		5. GAPURA	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 686,050,000	Rp. 1,358,471,000
		6. WATUKUMPUL	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 662,169,000	Rp. 1,334,590,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULASI	PAGU DANA DESA
		7. MAJALANGU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,412,550,000	Rp. 2,084,971,000
		8. BODAS	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 677,292,000	Rp. 1,349,713,000
		9. TUNDAGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 1,186,661,000	Rp. 1,859,082,000
		10. PAGELARAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 568,623,000	Rp. 1,241,044,000
		11. CAWET	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 788,359,000	Rp. 1,460,780,000
		12. WISNU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 626,290,000	Rp. 1,298,711,000
		13. JOJOGAN	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 774,794,000	Rp. 1,447,215,000
		14. TAMBI	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 542,382,000	Rp. 1,214,803,000
		15. MEDAYU	Rp. 672,421,000	Rp. 0	Rp. 460,907,000	Rp. 1,133,328,000
		Jumlah	Rp. 10,086,315,000	Rp. 0	Rp. 13,120,380,000	Rp. 23,206,695,000
		JUMLAH TOTAL	Rp. 141,880,831,000	Rp. 1,690,311,000	Rp. 158,242,894,000	Rp. 301,814,036,000

PARAF HIERARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 2^e Januari 2019
Nomor : 180/ 34 / Hk
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati.

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah Dikoreksi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.
Yang telah diajukan oleh Dinpermasdes Kabupaten Pemalang.
- 2 Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

**ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG**

AUNUROFIQ, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600122 198702 1 001

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI	
Kasubag	

BUPATI PEMALANG	
AGENDA SURAT	
Tgl. Turun :	24 JAN 2019
Nomor :	571
Paraf :	



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA**

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kabag Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Dari : Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang
Nomor : 142/ 164 /Dinpermasdes
Tanggal : 16 Januari 2019
Perihal : Mohon Koreksi (Naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019).

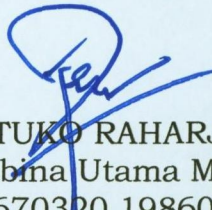
Diberitahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sajikan naskah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana terlampir.

Selanjutnya mohon Kabag Hukum Setda Kabupaten Pemalang berkenan untuk memberikan koreksi atas naskah Peraturan Bupati dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN PEMALANG**


Drs. TUTUKO RAHARJO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 198603 1 005